

Abstract: *Land utilization at this time encounters many problems due to the lack of public awareness regarding the importance of ownership of land rights to the attitude of people who are indifferent to their surroundings. This clearly causes conflicts, until disputes arise over the utilization of state land by the community. The purpose of this study is to determine the responsibility of the Special Capital Region of Jakarta Government and the settlement of disputes over the issuance of building permits on land owned by PT Pertamina (Persero) located in Plumpang. The author uses normative juridical research using books, journals and expert opinions as secondary data sources. The Provincial Government of DKI Jakarta is responsible for all risks that may arise as a result of the issuance of IMB for residents around the PT Pertamina Depot in Plumpang as a consequence of the rule of law and democracy. In addition to dispute resolution through the general judicial channel, there are other ways with non-litigation channels or out-of-court channels. Responsibility consists of 2 (two) types, namely political responsibility (responsibility) and legal responsibility (liability). Dispute resolution can be carried out through the litigation route, namely by civil lawsuit and/or state administrative lawsuit and non-litigation route with alternative dispute resolution.*

Keywords: *State Land; Dispute; Accountability, PT. Pertamina*

Abstrak : Pemanfaatan tanah pada saat ini banyak menemui permasalahan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan hak atas tanah hingga sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Hal ini jelas menimbulkan konflik, hingga timbulnya sengketa atas pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta dan Penyelesaian Sengketa terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan di atas tanah milik PT Pertamina (Persero) yang terletak di Plumpang. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan buku-buku, jurnal dan pendapat para ahli sebagai sumber data sekunder. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerbitan IMB bagi warga di sekitar Depo PT Pertamina di Plumpang sebagai konsekuensi dari negara hukum dan demokrasi. Penyelesaian sengketa Penerbitan Izin IMB dapat dilakukan melalui jalur peradilan umum, selain cara tersebut terdapat cara lain melalui jalur non litigasi atau jalur di luar pengadilan. Tanggung jawab terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu tanggung jawab politik (*responsibility*) dan tanggung jawab hukum (Penyelesaian Sengketa terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan di atas tanah milik PT Pertamina (Persero) yang terletak di Plumpang). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi yaitu dengan gugatan perdata

dan/atau gugatan Tata Usaha Negara dan Jalur Non Litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keyword: Tanah Negara; Sengketa; Pertanggungjawaban, PT. Pertamina



